



PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG KADER PARTAI GOLKAR

AD Partai Golkar membentuk Mahkamah Partai untuk menyelesaikan perselisihan hukum. Selain itu, terdapat Dewan Etik di tingkat pusat yang berfungsi menegakkan kode etik dan pakta integritas untuk menjaga harkat dan martabat partai.

- **Pasal 20 (Dewan Etik dan Dewan Kehormatan):** Menjelaskan pembentukan dan wewenang dewan-dewan ini dalam menegakkan kode etik partai.
- **Pasal 67 (Penyelesaian Perselisihan Hukum):** Merinci jenis perselisihan dan peran Mahkamah Partai sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikannya.



PPID



PARTAI GOLKAR